



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : Pukul 13.09 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023,
2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022,
3. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024,
4. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
19 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)
4 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Ir. Sudjadi
 3. Harvey B. Malaihollo
 4. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA) 3 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 3. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 2 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 2. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 2 dari 5 orang Anggota
 1. Willem Wandik
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 0 dari 5 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 2 dari 4 orang Anggota
 1. Hanna Gayatri, S.H.
 2. Athari Ghauthi Ardi

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selama siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajarannya,
serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita panjatkan puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum dilanjutkan walaupun sudah melewati sebulan, perkenan kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 144 Hijriah, bagi yang beragama Islam, mohon maaf lahir dan batin.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani 17 orang dan 6 Fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.09 WIB)

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami, pada hari ini, untuk hadir membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dan pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri, yang kami hormati,**

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun Anggaran 2024 bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasikan tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 29 Mei 2023 adalah sebesar

27,64%, untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya terkait dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih terdapat 10 temuan terkait belanja barang atau jasa yang dua temuan terkait aset dengan indikasi kerugian negara sebesar 5,1 miliar. Dari temuan tersebut, yang memberikan kerugian cukup besar antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 14 paket pekerjaan pada Satker tugas pembantuan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak minimal.
2. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 6 Satker.
3. Pelaksanaan 9 paket pekerjaan pada 3 Satker, tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak minimal.

Agenda berikutnya akan kita bahas pada rapat kerja ini adalah rencana kerja pemerintah dan pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024, dalam hal ini pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran Tahun 2024, dengan cara peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 2,75 triliun, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pedesaan dan transmigrasi, program dukungan manajemen, dan program daerah tertinggal.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Komisi V DPR meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar Belanja Kementerian Tahun 2024 diarahkan untuk pemerataan layanan kesejahteraan masyarakat, mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Perlunya mendorong berbagai faktor yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal antara lain meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong *stakeholder* untuk berpihak pada pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian.

3. Meningkatkan kinerja BUMDes dan desa wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa
4. Perlunya tenaga pendamping desa yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, terutama dalam pemanfaatan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditentukan.

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan terkait agenda rapat kita hari ini, kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan,

**Yang kita hormati dan kita banggakan Ketua,
Wakil Ketua,
Jajaran Pimpinan Komisi V, beserta
Seluruh Anggota Komisi V,**

Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk menyampaikan beberapa hal sebagaimana telah disampaikan oleh Pimpinan rapat.

Yang kedua, keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan juga saya sekaligus sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila selama kita bersinergi ada hal-hal yang kurang berkenan dan mudah-mudahan sinergi kita ke depan semakin bagus untuk kepentingan bangsa dan negara.

Yang ketiga, sebelum kami melaporkan beberapa hal perlu kami juga laporkan bahwa ada pergantian pejabat di Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yang pertama adalah Inspektur Jenderal dengan dijabat oleh Pak Teguh, sarjana hukum, silakan berdiri. Kemudian yang kedua, Dirjen transmigrasi yang sekarang dijabat oleh

Ir. Danton, silakan berdiri, Pak Danton, terima kasih. Ini adalah dua pejabat Eselon I, yang telah mendapatkan persetujuan Presiden untuk kemudian kita lantik sebagai Inspektur dan Dirjen PPK Trans.

Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota Komisi V yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami melaporkan beberapa hal, yang pertama terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

Diawali dengan postur anggaran, Tahun Anggaran 2023. Kita dari 2,99...Rp2.997.030.000.000,- setelah dilakukan blokir *auto adjustment...automatic adjustment*, Pagu Efektif dari Pagu Tahun Anggaran yang kita peroleh beberapa waktu yang lalu, menjadi Rp2.797.849.480.000,-. Sehingga, anggaran yang kita kelola dalam Pagu efektif sebagaimana tersebut.

Sedangkan untuk kinerja serapan anggaran tahun 2023 sampai dengan 28, sampai dengan 30 Mei 2023, hari ini. *Alhamdulillah* kita sudah bisa menyerap sebesar 28,08% yang meskipun demikian masih ada kesenjangan dengan target penyerapan yang sudah kita tetapkan yaitu 31,79%.

Nah, kalau kita lihat realisasi anggaran per unit Eselon...unit kerja Eselon I, yang di bawah rata-rata kementerian itu ada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, dan Pedesaan, kemudian Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada juga Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan juga Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ini yang penyerapannya di bawah rata-rata Kementerian 28,08%. Di mana, serapan di bawah rata-rata Kementerian itu kontribusi terbesarnya adalah dari kegiatan yang bersumber dari PHLN yang masih dalam proses mendapatkan NOL (*No Objection Letter*) dari pihak donor, serta kegiatan dekonsentrasi

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Izin, Pimpinan.

Pak Menteri, data yang ditampilkan berbeda dengan data yang kita.

KETUA RAPAT:

Gimana ceritanya coba.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Data yang di kita itu totalnya 72.36, data di *slide* itu 71.92.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Oh iya, terima kasih, mohon maaf.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Yang halaman 4 juga.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Jadi, ini memang baru di-*update*, sementara kita menyerahkan sejak menerima undangan, itu memang tanggal di realisasi bisa dilihat yang kita serahkan beberapa waktu yang lalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita selalu berupaya undangan hadir langsung kita kirim. *Nah*, kemudian yang saya paparkan ini *update* hari ini untuk penyerapan, mohon izin.

Terima kasih.

Izin, Pimpinan, saya lanjutkan, jadi dari sekian tadi, permasalahan penyerapan yang masih di bawah rata-rata kementerian itu karena memang PHLN yang masih dalam proses *No Objection Letter* dan juga Dekon, dekonsentrasi, ini yang memang selalu menjadi tantangan kita untuk selalu berupaya agar terjadi percepatan.

Kemudian yang berikutnya, kita akan laporkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Nanti juga ada yang sedikit berbeda karena tindak lanjut tanggal beberapa waktu yang lalu dengan progres yang kita lakukan ada perkembangan-perkembangan, nanti kita laporkan.

Yang pertama, *alhamdulillah* capaian opini sejak 2016-2021 kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kemudian, untuk 2021, untuk pertama kalinya kita dilakukan audit BPK untuk Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) program TEKAD. Jadi kalau TEKAD memang *core*-nya di Kementerian Desa sehingga audit BPK ada di Kementerian Desa, beda dengan WB (World Bank) yang *core*-nya ada di Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk pertama kalinya audit BPK dan *alhamdulillah* kita juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Para Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kemudian, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan rapat tadi, tahun 2021 kita dapatkan 10 temuan untuk belanja barang dan jasa, 39 butir rekomendasi senilai 5,1 miliar, di mana dari 10 rekomendasi ini...*eh* 10 temuan dan 39 rekomendasi, terus kita tindaklanjuti secara cepat, tepat, dan ada progress-progres yang cukup bagus.

Kemudian, yang terkait dengan aset ada dua temuan dan 11 butir rekomendasi. Sedangkan, rincian temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana kita laporkan ini. Di mana dari 50 butir rekomendasi, kita tindaklanjuti per 30 Mei, mungkin di sini ada sedikit perbedaan juga, di mana rekomendasi sesuai tindak lanjut sebanyak 38 butir, serta telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai 1.724.293.721 dan rekomendasi belum sesuai tindak lanjut sebanyak 12 butir dengan nilai Rp3.574.451.769, dengan bobot yang menyebar, ya, bobot yang menyebar misalnya di temuan rekomendasi temuan nomor 8. Enam rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti baru 1,97...Rp1.097.941.186 (suara kurang jelas) sehingga masih harus kita tindaklanjuti sampai dengan tuntas Rp2.544.785.693,-

Kemudian, yang lain-lain, relatif sudah selesai dan yang tertinggi kedua, poin kedua kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Rp673.723.000.700. Rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 3 butir, serta telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp173.440.201.000,- dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu butir senilai Rp500 Juta. Ini yang nilai-nilai besar yang terus akan kita tidak lanjut termasuk juga pelaksanaan 9 paket pekerjaan pada 3 Satker, jadi yang terbanyak itu adalah di Dekon, di Dekon, di mana memang ini menjadi tanggung jawab dan tantangan kita untuk terus melakukan upaya-upaya maksimal agar model-model seperti ini bisa kita minimalisir di masa-masa yang akan datang.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sedangkan, laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Belanja barang-jasa ada 10 temuan, 34 rekomendasi senilai 1,51 miliar, yang kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaannya atas laporan tersebut sudah kita selesaikan penyetoran ke kas negara senilai Rp1.140.500.233,- dan rekomendasi yang belum sesuai tindak lanjut sebanyak 12 butir senilai Rp376.258.383,-. Ini juga kebanyakan ada di wilayah Dekon.

Ini yang terkait dengan laporan dan kita terus melakukan upaya percepatan-percepatan proses penyelesaian di mana hambatan di dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang pertama yang selalu kita hadapi adalah temuan pada Satker daerah, yang memerlukan waktu untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan instruksi atau sanksi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Yang kedua, proses pemanggilan dan penandatanganan surat keterangan tanggung jawab mutlak pada pihak kedua...*eh* pihak ketiga, dan temuan perorangan pegawai juga memakan waktu yang cukup lama dalam proses negosiasi penyelesaian dilanjut hasil pemeriksaannya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita juga menerapkan strategi dan upaya penyelesaian agar cepat, tepat, dan sesuai dengan rekomendasi BPK. Yang pertama, memperkuat penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya temuan

berulang dan penyimpangan lainnya. Terus kita, bahkan kita lakukan mulai audit, audit bulanan sehingga kita *tau* dan sekitar bisa melakukan *e-learning* kepada seluruh jajaran di Kementerian Desa.

Yang kedua, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui regulasi penyelesaian kerugian negara, yaitu Permendesa Nomor 20 Tahun 2019 dan Kepmendesa Nomor 12 Tahun 2020, karena ini memang tugas kita agar terjadi percepatan.

Yang ketiga, mengoptimalkan peran tim penyelesaian kerugian negara dan majelis penyelesaian kerugian negara dalam penetapan dan penagihan piutang negara. Yang keempat, melanjutkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Yang kelima, membangun zona integritas. Yang keenam, memastikan target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik APIP dan BPK oleh masing-masing JPT Madya dan JPT Pratama, sesuai dengan target IKU yang sudah ditetapkan di masing-masing unit kerja Eselon I. Tiap awal tahun, kita selalu membangun komitmen dengan seluruh Pejabat Tinggi Madya maupun Pratama.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Berikutnya kita laporkan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan rapat tadi, bahwa tema RKP 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sedangkan Pagu dan realisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari tahun 2015 sampai tahun 2024 yang akan datang, untuk Pagunya, bisa kita laporkan pada posisi masih Pagu Indikatif itu pada posisi Rp2.757.268.382.000,-. Sedangkan Pagu Indikatif untuk masing-masing UK-1, baik untuk operasional, non operasional, dan total sebagaimana kita laporkan. Kemudian, rincian PHLN dan PNBP tahun, PNBP tahun anggaran 2024 kita di program tekad yaitu ada 129 miliar dan 3 miliar hibah sehingga total ada 132 miliar, ini khusus untuk 5 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Kemudian program penguatan dan pembangunan desa, P3PD ada Rp205.554.169.000. Sehingga, total baik dari untuk program IFAD maupun P3PD ada Rp337.554.169.000,-. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak kita memproyeksikan Rp1.544.000.000,-

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 kita total Pagu kebutuhannya Rp4.744.518.054.000,-. Kemudian, total Pagu Indikatif yang diberikan kepada kita Rp2.757.268.382.000,- sehingga ada angka *backlog* sekitar Rp1.987.249.672,-.

Sedangkan *output* prioritas sebagaimana hasil *trilateral meeting* untuk tahap pertama, sebagaimana kami laporkan, dan tentu ini masih dalam proses. Sehingga, kami juga akan terus memperjuangkan dan meng-*endorse* dan menginternalisasikan apa yang menjadi rekomendasi Komisi V misalnya terkait dengan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, kualitas SDM, meningkatkan kinerja BUMDes, desa wisata, dan lain-lain, sebagaimana disampaikan dalam pengantar oleh Pimpinan rapat tadi, tentu juga menjadi bagian penting bagi kami untuk mematangkan *output* prioritas yang tentu nanti juga akan ditindaklanjuti di dalam RDP antara Komisi V dengan teman-teman di eksekutif atau di UK-1.

Pimpinan komisi dan Anggota Komisi yang saya hormati,

Tentu saya tidak akan baca satu persatu per Dirjen karena ini juga baru tahap pertama yang kami mohon juga pencermatan di luar forum ini sehingga nanti pada saatnya kita bisa betul-betul menerapkan apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi V untuk *output* prioritas anggaran tahun 2024.

Demikian, yang bisa kami laporkan kurang lebihnya mohon maaf dan mohon arahan lebih lanjut.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Sekali lagi terima kasih, kebetulan Pak Dirjen yang baru diangkat ini temen saya ini, Pak, di kampung dulu, makasih. Tentu meski saya tidak minta dia akan perhatikan wilayah saya Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat, mungkin ada saran dan masukan. Di sini yang terdaftar sudah ada, kita mulai dari Pak Syafiuddin, silakan Pak Syafiuddin dari Fraksi PKS...*eh* PKB, PKB, PKB.

F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan beserta segenap rekan-rekan Komisi V, Gus Menteri, yang saya hormati dan yang saya *taqdim-i*, beserta Jajaran Kementerian Desa yang hadir yang saya hormati juga,

Pertama, terkait dengan hasil WTP, itu kita kemarin di 2022 juga melihat bahwa sudah 5 kali berturut-turut, bahwa Kementerian PDT mendapatkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian, kita sebagai Anggota Komisi V sangat mengapresiasi itu.

Terus yang kedua, terkait dengan RKA yang ada untuk anggaran 2024. Sangat *jomplang* sekali di dalam Pagu kebutuhan yang sebesar 4 triliun 744 miliar sekian. Namun, di total Pagu Indikatif yang 2,7 triliun, tentunya ada *backlog* yang 1,7...1,9 ini sangat tinggi sekali, jadi saya berharap kepada teman-teman Komisi V nanti di pembahasan selanjutnya untuk lebih menguatkan dan menegaskan, karena memang di Kementerian Desa ini kalau kita bandingkan dengan Kementerian Perhubungan *aja* di Dirjen, satu Dirjen, ini tidak bisa melampaui anggaran yang ada Dirjen Perhubungan tentunya, karena memang Kementerian Desa ini, hal-hal yang bersifat negatif malah itu diarahkan kepada Kementerian Desa. Namun, kalau bermanfaat malah itu diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait dengan kewenangan ini tentunya nanti kita berharap juga, bahwa ada penguatan yang sangat penting bagi kita Komisi V bukan karena Gus Menteri sebagai Pimpinan saya, namun tentunya karena juga berharap bahwa mitra kita Kementerian Desa ini juga bisa memberikan ruang yang baik kepada...apa namanya *outcome* politik terhadap Komisi V.

Pak Menteri yang saya hormati,

Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, hal-hal yang ada di desa yang bersifat bagus malah diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, namun hal-hal yang bersifat negatif banyak aspirasi yang ditujukan kepada Kementerian Desa, padahal kewenangan-kewenangan itu tentunya lebih didominasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seperti contoh begini, di daerah pemilihan saya di Madura ada beberapa kabupaten yang sudah melakukan pemilihan kepala desa secara serentak. Barusan, kemarin...kemarin ini, kemarin sudah ada pelantikan 146 kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat Madura, terkait dengan PP-43/2014 di mana di situ bahwa pencalonan kepala desa itu minimal harus diikuti oleh dua orang, namun yang paling tidak bagus dan menurut saya pribadi juga ini adalah membatasi hak asasi dari warga masyarakat yang tentunya juga ingin tampil di pemilihan kepala desa karena di PP-43/2014 tertulis jelas bahwa pembatasan maksimal calon kepala desa adalah 5 orang, tentunya ini adalah mendistorsi terhadap hakikat demokrasi itu sendiri bahwa semua warga negara berhak untuk dicalonkan, baik itu sebagai kepala desa, baik itu sebagai parlemen ataupun kepala daerah dan presiden tentunya.

Saya berharap karena memang di bawah seakan-akan urusan desa, urusan Pak Mendes, padahal kewenangannya akan sangat terbatas juga, urusan peraturan pemerintah seumpama, ini lebih didominasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun tentunya Pak Menteri, mohon koordinasinya mungkin di rapat kabinet terbatas atau mungkin di rapat kabinet yang lain bahwa PP terkait dengan pembatasan maksimal 5 calon kepala desa ini, ini mendistorsi hakikat demokrasi itu sendiri. Apakah orang yang hanya

lulusan SLTP? Apakah orang yang tidak mampu tidak boleh untuk tampil dipilih di dalam demokrasi ini? Tentunya saya berharap bahwa PP ini untuk direvisi kembali oleh pemerintah, jangan sampai hal-hal yang kira-kira memberikan ruang politik terhadap kepala daerah melakukan rekayasa untuk menjatuhkan calon-calon yang tidak diinginkan oleh kepala daerah atau oknum-oknum tertentu di daerah itu, itu tidak terulang kembali.

Kemarin, di Bangkalan, pintu masuk terhadap pembatasan 5 calon ini ada preseden yang sangat buruk, ada satu kepala desa yang tidak bisa tampil sebagai calon kepala desa, ini sangat ironis sekali. Ada seorang presiden seumpama, *incumbent* tidak boleh dan tidak bisa mencalonkan presiden, ini kan sangat ironis. Di Bangkalan kemarin, sampai terjadi kasus mohon maaf karena memang saya menjadi tumpuan masalah dan aspirasi dari para masyarakat, para tokoh untuk disampaikan kepada pemerintah, karena pintu masuk terjadinya pembunuhan kemarin, terjadinya carok di dalam pra panitia...pra pemilihan kepala desa ini adalah pintu masuknya adalah penjatuhan-penjatuhan terhadap calon-calon kepala desa tertentu. Yang sangat ironis, seorang *incumbent* kepala desa tidak boleh dan tidak bisa tidak lolos menjadi calon kepala desa.

Saya berharap pintu masuk yang menjadi persoalan ini oleh Kementerian Desa walaupun itu bukan kewenangan oleh Kementerian Desa tentunya ini dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dikoordinasikan dengan Kementerian-Kementerian terkait. Mudah-mudahan ke depan PP-43/2014 ini, ada revisi, sehingga tidak menimbulkan persoalan, apalagi persoalan itu di tingkat desa karena semangat dari pemerintah adalah bagaimana menumbuhkembangkan, menguatkan desa, sehingga apabila desa maju maka negara akan maju.

Yang kedua, Pak Menteri, mohon izin aspirasi dari masyarakat desa juga terkait dana desa yang sekarang sudah sekitar antara 500 juta sampai 1 miliar, sampai 2 miliar, mungkin bisa ditingkatkan kembali karena memang sangat bermanfaat sekali uang yang ada di desa itu berputar sangat banyak maka menurut orang-orang yang ahli ekonomi, perputaran uang yang banyak itu tentunya ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat desa itu sendiri.

Dan, yang paling terakhir, Pak Menteri, saya berharap bahwa saya tetap mendukung pemerintah untuk menguatkan desa sebagai pemerintahan terbawah di negara kita dan saya sepakat bahwa apabila desa kuat maka negara akan kuat.

Mungkin hanya itu, Pimpinan, terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syaifuddin.

Memang ini kasus...apa, peraturan pemerintah nomor 43 ya tentang pemilihan desa, batasan 5 ini menjadi masalah itu, Pak. Di kampung saya itu jadi masalah itu, Pak. Masalah yang paling utama kebetulan keponakan saya bupati, jadi para kepala desa mencalonkan tadi itu misalkan melebihi 5 minta tolong *dong* bagaimana cara bisa masuk 5, ini kan jadi masalah, Pak. Untung tidak jadi keributan seperti Madura, pembunuhan, *ngeri* juga itu, Pak, (suara kurang jelas)...lah barangkali.

Mekanismenya kalau lebih dari 5 misalnya, contohnya ya, ya pemilihan dua kali, siapa terbaik diambil 5 itu, itu lebih efektif. Daripada dibatasi menjadi permainan di sana, PMB utamanya bermain, dicarikan kesalahan-kesalahan orang dan seterusnya, saya tambahkan Pak Syafiuddin tadi, ya, terima kasih Pak. Pikiran Pak Syafiuddin tadi.

Kemudian, Pak Willem Wandik, silakan.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, Pak Ketua.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan juga
Pak Menteri,
Pak Sekjen, dan
Seluruh jajarannya yang kami hormati,**

Dari kami, pertama, terkait dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan APBN 2020...*eh* 2023 sampai bulan Mei, kami memberikan apresiasi atas pencapaian penyerapan ini. Namun, kami apa memberikan catatan sedikit terkait dengan...untuk dirjen desa dan pedesaan masih per triwulan pertama. Ya, walaupun masih di atas 20% tapi kiranya terus diperhatikan, ikuti juga Dirjen yang lain karena kami menyadari bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini ada di garda terdepan dalam penyelenggaraan kita pembangunan, dan juga untuk serapan anggaran 2023, secara keseluruhan sampai dengan bulan Mei sudah di atas 20% dan naik realisasi serapan anggaran tahun 2022 pada bulan Mei, akan tetapi kami melihat realisasi untuk bulan, realisasi untuk membawa untuk belanja modal terlihat masih kecil dari total Pagu, karena itu perlu diperhatikan baik.

Dan, untuk hasil pemeriksaan BPK RI semester pertama tahun 2022 telah diperoleh dengan penilaian WTP, kami memberikan apresiasi namun diharapkan supaya terus diperhatikan supaya ini benar-benar terjaga, karena pengelolaan anggaran tidak saja dari APBN murni tapi juga dari PHLN sehingga ini juga jadi beban negara, karena itu memang perlu perhatian dan kehati-hatian dalam realisasi anggaran.

Dan, terkait dengan realisasi anggaran menurut fungsi dan program prioritas untuk 2024 ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pertama, untuk jalan poros desa, jalan penghubung antar desa di kawasan perdesaan di mana di Papua itu masih jauh dari kata layak serta sarana air bersih bagi penduduk di-di wilayah Dapil kami, *udah* terbagi

hari ini, di mana dengan hadirnya DOB kami hadir konsentrasi di Papua Pegunungan. Oleh karena itu, kiranya bisa menjadi perhatian untuk Dapil kami Komisi V...Dapil kami. Kami salah satu Anggota Komisi V yang ada di sini dari Dapil Papua, Papua Pegunungan, dan kedua untuk pembangunan Pasar Prokades dan di kawasan pasar yang di Kabupaten Tolikara di mana ketersediaan pasar di kawasan pedesaannya sampai saat ini dirasakan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjual hasil bumi.

Oleh karena itu, mohon jadi perhatian dan terkait dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dari Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kiranya mohon diperhatikan pada rincian PHLN dan juga PNPB di halaman 21 terkait anggaran untuk Proyek TEKAD atau transformasi ekonomi kampung terpadu dengan total pinjaman luar negeri. Kami ingin agar supaya masuk ke daerah pemilihan kami juga.

Dan, yang berikut untuk bantuan sarana prokades perhutanan sosial apakah ini juga masuk di Dapil kami, terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dan, terkait dengan...yang ketiga, terkait *pilot project* prasarana air bersih di daerah tertinggal sebagai *output* prioritas 2024. Apakah bisa diimplementasikan di dapil kami, khususnya untuk Papua Pegunungan dan juga untuk pelaksanaan 15 paket perjalanan pada Satker tugas dan pembantuan dinas transmigrasi, di sini salah satunya adalah Kabupaten Kapuas, kalau bisa diperhatikan karena kami ikuti selama ini masa transmigrasi ini sebenarnya di program-program untuk tingkat taraf hidup, tapi banyak warga kita di kawasan transmigrasi ini, masih banyak memang, masih harus butuh perhatian, dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kiranya bisa menjadi perhatian seperti yang kami lihat di sini, di halaman 12 poin ke-8, itu yang bisa dapat kami sampaikan.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Willem.

Sekadar informasi saja dulu, Pak, tidak bermaksud membatasi dari Bapak-Ibu Anggota Komisi V terhormat. Tetapi bahwa, kita sampai setengah 4 waktu kita, karena jam 4 kita terima lagi, apa...kita rapat dengan BMKG...*eh* Basarnas...Basarnas. Berikutnya Pak Anwar Hafid, silakan, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita sekalian,

**Bapak Pimpinan, dan
Seluruh rekan-rekan sahabat Komisi V yang saya muliakan,
Pak Menteri,
Pak Sekjen, dan
Pak Dirjen, serta
Seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba melihat beberapa hal dari laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2023 sampai dengan Mei 2023. Secara administrasi tentu, pertama, saya ingin mengapresiasi...mengapresiasi bahwa capaian pada...sampai dengan Mei ini, kalau saya bandingkan tahun 2022 jauh lebih besar serapannya, tentu ini sebuah hal yang sangat menggembirakan tentunya. Saya hanya ingin bicara pada tataran kebijakan Pak Menteri.

Yang pertama, saya melihat saya ingin mendapatkan penjelasan. Kenapa Dirjen percepatan pembangunan daerah tertinggal itu alokasi anggarannya sangat kecil? Dari semua dirjen saya lihat hanya 90 miliar di sini ya ya ini tidak bisa bukan sebagai koreksi karena ini sudah berjalan, Pak Menteri, tapi saya berharap ke depan mungkin ini menjadi salah satu prioritas, Pak Menteri. Kita tidak ingin lagi ke depan ini masih ada daerah-daerah kita yang tertinggal. Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari daerah tertinggal itu hanya dengan kerja seorang Kementerian, sebuah Kementerian saja, tapi ini tentu kerja semua, kerja bareng-bareng semuanya, tapi saya ingin bahwa Kementerian Daerah Tertinggal memberi prioritas khusus bagaimana kita lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah kita yang masih ter...masih dalam kategori daerah tertinggal.

Saya laporkan, Pak Menteri, di Sulteng itu masih ada tiga kabupaten daerah tertinggal di sana, mudah-mudahan Ini juga sebuah sebenarnya, Pak Menteri, sebuah hal yang apa, ya, memalukan juga ini kalau daerah Sulteng itu daerah adalah daerah yang tujuan investasi yang begitu besar tapi masih ada daerah tertinggal. Saya ingin juga mudah-mudahan ini mendapat perhatian kita coba membedah bersama-sama kenapa masih ada istilah daerah tertinggal itu walaupun saya lihat daerah-daerah tertinggal yang dimaksud, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ini sudah lebih maju Pak Menteri itu Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, itu Kabupaten Parigi Moutong saya lihat, itu daerah-daerah yang cukup maju sebenarnya, mungkin sudah bisa dievaluasi kalau memang sudah memenuhi standar mendingan dikeluarkan dari stigma itu Pak Menteri, ini menjadi sebuah apa ya.

Kemudian, selanjutnya yang kedua, saya melihat dalam tataran kebijakan memantapkan *output* prioritas ke depan. Beberapa saran saja, Pak Menteri, saya lihat di sini di rancangan ini sudah cukup bagus alokasi untuk pembangunan daerah tertinggal sudah jauh lebih besar dibanding tahun 2023.

Ada dua hal, saya lihat, soal desa yang sangat mendesak bagi desa kita, karena saya sering bilang bahwa Indonesia ini kita bangun sebesar apapun kalau desa tidak diperhatikan maka fondasinya akan rapuh. Ibarat manusia kita

sekarang ini baru coba membangun mukanya, tampilan itu kalau dilihat mukanya memang Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Orang kalau tiba dari luar negeri ke Jakarta ini, melihat Jakarta dan daerah-daerah Jawa ini luar biasa, Pak. Tapi, kita tidak lihat bahwa sesungguhnya landasannya desa-desa kita di Indonesia ini masih banyak daerah desa yang tertinggal.

Ya, mungkin ke depan ini kita sama-sama berjuang, Pak Menteri, mudah-mudahan alokasi dana desa itu ke depan bisa mendapatkan prioritas yang lebih besar lagi ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga sekarang ini desa kita ini *alhamdulillah* berkat binaan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, baik di sisi administrasi pemerintahannya. Sekarang ini sudah jauh lebih baik, Pak Menteri, pengelolaan dana desa itu jauh lebih baik. Saya melihat di lapangan sudah sangat maju.

Ada beberapa misalnya contoh BUMDes kita. BUMDes kita di beberapa daerah di beberapa desa itu sudah sangat maju, bahkan sudah ada BUMDes yang sebagai sudah menjadi bapak angkat bagi semua UMKM-UMKM yang ada di desa sebetulnya. *Home seller* itu sudah ada. *Nah*, kita berhadap seluruh BUMDes kita ini bisa menjadi *home seller* bagi seluruh UMKM kita. *Nah*, ini tentu ini butuh...butuh penguatan kapasitas, ada saya lihat programnya Pak Menteri bantuan kepada BUMDes saya kira ini yang perlu, Pak, sangat perlu dalam rangka kita meningkatkan kemampuan desa kita, kemampuan ekonomi desa kita dan masyarakat kita, karena semakin besar anggaran yang langsung menyentuh desa tentu perputaran dalam hukum ekonomi kita semua *tau* bahwa *multiplayer effect* itu akan terjadi ketika anggaran itu ada di desa.

Sekalipun di kabupaten, di kota, sudah banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah tapi tidak semuanya menetes ke desa langsung, tapi kalau anggaran alokasi dana desa ini langsung, langsung ke kas-kas desa saya kira akan jauh berbeda ya, akan jauh berbeda *multiplayer effect* yang terjadi ketika dana alokasi desa ini ditingkatkan dari sekarang tentu ini butuh perjuangan kita semua dan panglimanya tentu, Pak Menteri, itu kita berjuang kepada Bapak Presiden sehingga 2024 di akhir masa jabatan presiden bisa memberikan hadiah terbaik buat desa di Indonesia dengan memberikan alokasi dana desa yang cukup signifikan dari kondisi yang ada sekarang, saya kira itu amanah Undang-Undang desa.

Kemudian, yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, saya melihat ada beberapa hal, Pak Menteri. Biasanya ya, kita sangat bangga dengan Wajar Tanpa Pengecualian, saya lihat hasil temuan kerugian negara, saya lihat di sini cukup minim Pak...Pak Menteri dengan presentasi anggaran di kementerian ini dengan temuan kurang lebih sekitar 5 miliar, kalau kita lihat ini memang pantas mendapatkan WTP karena masih dalam ambang batas 3% dari total yang biasa kalau sebagai ukuran BPK.

Oleh karena itu, saya berharap ke depan mudah-mudahan *zero* temuan Pak Menteri, sehingga Kementerian PDT ini akan lebih bangga lagi ketika WTP itu dengan *zero* temuan. Saya kira demikian, apa yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

*Allahul musta'an,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Anwar Hafid.

Pak Djenri.

F – PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH):

Terima kasih atas kesempatan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Pimpinan rapat,
Kementerian PDT, mitra rapat hari ini yang kami hormati,**

Saya kira saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya, pertama tentang evaluasi pelaksanaan APBN, tahun sebelumnya. Memang dari sisi kuantitas sudah cukup baik karena BPK sudah memberikan opininya terhadap Kementerian ini cukup bagus, tetapi masih ada catatan juga yang perlu diperhatikan seperti yang disampaikan rekan tadi.

Kebanyakan temuan itu adalah kelebihan bayar, ini, Indonesia ini masih sebagian besar desa. Jadi, kalau hampir semua desa nanti kelebihan bayar, nanti negara ini juga akan menuju ke kelebihan bayar nanti. Mungkin ini juga jadi catatan untuk diperbaiki. Mungkin kalau *zero* 2023, nanti *zero* temuannya itu saya kira belum pernah ada mungkin di Kementerian atau di Lembaga ya, sama dengan kita manusia *nggak* ada yang sempurna, pastilah karena masih orang.

Kemudian, evaluasi itu juga yang 27% sekian ini, 2023, ya sedang jalan, khususnya aspirasi kita, mohon dibenahilah aturan-aturannya karena seperti kemarin kan, kita ada fokus jalan ke daerah wisata, ternyata diganti lagi, *nggak* boleh, sementara kita di daerah udah siapin jalannya, udah mungkin ada pembersihan dan lain sebagainya tapi tiba-tiba keluar peraturan baru katanya dari Kementerian bahwa *nggak* boleh ada jalan lagi ke daerah wisata, tempat wisata, sehingga harus dirubah lagi, untuk diapakan perubahan itu.

Berikutnya, karena ini juga bicara tentang APBN 2024, saya masih sangat miris dengan kementerian ini. Apalagi masih pakai daerah tertinggal di belakang masih ada transmigrasi dan lain sebagainya. Saya terus terang masih sangat prihatin, sehingga pernah saya mengatakan kalau anggarannya hampir tidak sampai 3 triliun, yang bicara desa katanya negara kuat dari desa kuat

harusnya begitu, tapi rupanya kementerian ini dianggap tidak terlalu penting padahal saya ini orang desa, Pak, tinggal di desa, itu kebutuhan desa itu luar biasa, besar sekali walaupun dari kementerian lain juga banyak sentuhan-sentuhan di desa.

Tapi, seperti yang saya katakan tadi, anggaran 3 triliun untuk Indonesia yang sebesar itu masih *agak* wajarlah kalau kementerian mengatakan seperti itu karena kan kementerian itu menterinya ada di masih ada atasannya ya. Sehingga saya mendorong seperti yang teman saya katakan tadi kalau boleh anggaran 2024 ditambah lagi, lebih khusus yang saya perjuangkan selama ini di desa apakah itu lewat dana desa.

Perangkat desa dan kepala desa sekarang ini menjerit terus, ya apalagi hasil pemilihan-pemilihan kepala desa menjerit terus mereka pengeluarannya minta ampun, bahkan ya, kalau kepala-kepala desa atau lurah yang-yang berduit boleh-boleh saja, tapi yang umumnya di desa-desa di pedalaman mereka ajak duit pribadi mereka hadir di satu acara itu ada amplop, ke sana-ke sini lain sebagainya *nggak* cukup lah, kalau cuma mau ambil dari tiga persen itu *ngapain*.

Ya saya usulkan juga kan WHO sudah mencabut darurat Covid, arahkan aja ke tunjangan untuk perangkat desa dan kepala desanya. Dan, saya minta 2024 kalau boleh itu ditambah, ditambahkan, lebih khusus kepada para perangkat dan kepala desa ini, ya, begitu. Mudah-mudahan saya berharap di rancangan 2024 ini, banyaklah aspirasi yang mau kita bawa ke daerah dalam bentuk apapun.

Sekarang ini, saya baru pulang tadi pagi dari kampung juga, desa wisata itu banyak di...diminta oleh desa-desa apalagi kalau dia dihubungkan dengan BUMDesnya itu, BUMDes itu luar biasa dan seperti kesaksian teman tadi, sudah banyak BUMDes yang menjadi bapak angkat di desa, tapi banyak juga BUMDes yang pengelolaannya hanya memperkaya pengurusnya, itu bukti ada saya bisa kasih. Mungkin juga ini evaluasi kita dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman Komisi V juga bisa nanti kita mengusulkan Kementerian Desa ini agar supaya aspirasi kita di 2024, apalagi tahun politik, ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi.

Makasih, Pak Pimpinan, ini usul saya untuk mitra rapat kita hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Makasih, Pak Djenri.

Kalau minta Pak Menteri, agar ditambah uang desa pasti dia maulah, tapi kan Pak Menteri juga langsung meminta ke Menteri Keuangan melalui Presiden. Ya, mungkin kita sama-sama Komisi V memperjuangkan, karena bagaimana pentingnya PDT ini dan dari Kementerian juga tentu memberi keyakinan kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Pak Muhammad Aras silakan, Pak.

F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat, Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri, dan
Pak Sekjen,
Pak Irjen, dan
Seluruh jajaran yang sama berbahagia,**

Pertama-tama, tentu evaluasi yang sedang berjalan, ya, *alhamdulillah* Kementerian Desa cukup memperlihatkan *trend* yang cukup bagus, ya kami mengapresiasi, Pak, mudah-mudahan ke depan bisa menyelesaikan dengan baik sehingga apa yang menjadi program utama, program prioritas, di Kementerian Desa ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik.

Yang kedua, terkait dengan program 2024, ya, tentu sama-sama kita ketahui bahwa program yang kemarin yang sudah berjalan, sudah cukup baik sementara, seperti misalnya penganggaran untuk wisata desa. Ini pasca pandemi ini kan perlu ditingkatkan lagi, sehingga betul-betul kegiatan-kegiatan desa itu bisa lebih produktif.

Selama tiga tahun terakhir ini, wisata ini hampir seluruh daerah mati suri Pak Menteri, sehingga tentu untuk ke depan agar masyarakat desa bisa lebih cepat pulih dan lebih cepat untuk bisa eksis kembali tentu perbaikan-perbaikan fasilitas desa ini perlu ditingkatkan, termasuk juga dengan pasar desa. Ini dengan masuknya pasar-pasar modern, ya, jangan sampai pasar desa ini menjadi ditinggalkan, sehingga ini menjadi sangat penting untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa itu sendiri.

Kemudian, yang selanjutnya adalah terkait dengan BUMDes kemarin, yang kita kucurkan cukup lumayan, bisa membantu masyarakat, ini terus dilanjutkan. Sehingga, usaha-usaha desa terus berkembang, sehingga yang kita harapkan bahwa membangun dari desa itu betul-betul bisa terwujudkan, apalagi kita tinggal satu kali penganggaran untuk bisa menyelesaikan seluruh program-program presiden yang *insya* Allah akan berakhir di tahun 2024.

Dan yang terakhir, tentu kami berharap kerja sama yang baik dari teman-teman Komisi V bersama dengan Kementerian, di mana tentu pendamping desa yang setiap tahun diperpanjang itu, juga tetap berkoordinasi

dan berkomunikasi dengan Komisi V yang ada di Dapil, sehingga apa yang menjadi pekerjaan mereka betul-betul kita bisa pantau dan bisa berkomunikasi sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian bersama dengan kami tentu bisa dengan mudah akan kami, kita capai.

Barangkali itu, Pak Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Muhammad Aras.

Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen,
Pak Sekjen, dan
Seluruh Dirjen, dan
Seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini,**

Ada tiga poin saja, Pak Menteri, yang pertama tentu saya berikan apresiasi atas capaian tahun 2022 ya dan atas capaian apa yang telah dilakukan masih kurang lebih 70% anggaran yang harus dihabiskan lagi. Catatan yang terkait ini, saya hanya mendorong Pak Menteri, untuk sesegera mungkin memanfaatkan sisa anggaran itu untuk melaksanakan sesuai dengan program-program yang telah disepakati agar supaya pergerakan ekonomi di desa juga bergerak dengan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Yang kedua, Pak Menteri, temuan BPK. Saya hanya ingin memberi catatan bahwa, apapun temuan itu kalau tidak bisa kita selesaikan apalagi ada rekomendasinya pasti berujung kepada pidana. Saya membaca di sini, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, ini agak kesulitan di dalam menyelesaikan beberapa temuan yang ada, ini catatan yang saya baca. Persoalannya adalah yang memegang anggaran di daerah itu bukan aparat langsung, Pak Menteri, tentu meminta bantuan dari pemerintah daerah, di situ persoalan dasarnya.

Di sisi lain, tentu Pak Menteri juga kesulitan kalau menempatkan orang di sana. Saran saya adalah kenapa tidak diambil Satker pusat saja nanti dia keliling seluruh Indonesia, Pak, *nggak* usah ditempatkan di sana, biar berkedudukan di Jakarta tetapi ada perwilayahan yang bisa dia *cover, gitu loh*, sehingga memudahkan pengendalian dan kontrol, Bapak, di dalam penggunaan anggaran.

Coba bayangkan, Pak, kalau temuan ini tidak bisa diselesaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi ujungnya adalah pidana, siapa yang bertanggung jawab, ini menjadi catatan yang sangat *urgent*, sehingga tidak kita harapkan lagi ke depan itu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan walaupun sejumlah kecil, ya, kecil jumlahnya walaupun itu.

Jadi, oleh karena itu, Pak Menteri, kalau memang mengalami kesulitan di dalam pertanggungjawaban pengguna anggaran di daerah sebaiknya ditunjuk Satkernya masing-masing di tingkat pusat, nanti yang bersangkutan keliling di seluruh Republik Indonesia, itu tidak melanggar aturan Pak Menteri. Jangan kita mengambil kompas singkat dengan harapan di sana bisa lakukan, itu tidak bisa kita harapkan dengan maksimal. Ini karena saya lihat ada dua catatan, Pak Menteri, yang agak sulit untuk diselesaikan, itu yang kedua.

Yang ketiga, memang Kementerian Desa ini harapannya dan tumpuannya seluruh kegiatan program nasional, program kabupaten tumpu...tumpuannya adalah desa, tapi lagi-lagi status Kementerian Kemendes ini masih sifatnya koordinatif, bukan pada posisi kita sekarang ini untuk menambahkan anggaran Kementerian Desa, karena memang sudah ada aturannya.

Kalau Kementerian Desa itu adalah Kementerian teknis, saya kira itu bisa dilakukan penambahan anggaran, tapi ini sifatnya koordinatif dengan anggaran bantuan yang diberikan itu tentu sifatnya stimulan, itu ketentuan yang ada. Agak sulit kita mendorong-mendorong terus, Pak Menteri, menambah anggaran karena memang status kementeriannya seperti itu, itu *loh*. Kalau tiga triliun ya *alhamdulillah* sudah tiga triliun, Menteri koperasi persis, sama 2-3 triliun juga. Karena aturannya memang seperti itu, itu. kalau mau menambahkan ya. boleh-boleh saja tapi tidak terlalu jauh, itu yang menjadi catatan.

Selanjutnya. yang terakhir. Pak Menteri. Ini catatan kecil, tetapi mungkin kita bisa pikirkan dengan baik. Saya melihat apakah benar dugaan saya atau tidak, banyak-banyak pendamping desa itu menjadi Caleg. Ada, dan tidak diberhentikan sebagai pendamping. Apakah memang seperti itu *gitu loh?*. Mohon maaf kalau saya keliru di dalam menanggapi ini karena saya dapat informasi bahwa beberapa ataukah hampir ada pendamping menjadi Caleg. Harusnya, harus berhenti menjadi pendamping, kalau menurut saya tapi saya tidak tau aturannya seperti apa.

Saya kira itu, Pak Ketua, apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan-catatan kita semuanya. *Overall* secara keseluruhan kita apresiasi seluruh apa yang Bapak telah lakukan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Hamka.

Pak Ali Mufthi.

F – P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Bapak-Ibu sekalian Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Menteri,
Bapak Dirjen, Bapak Irjen, dan
Seluruh pejabat Kementerian Desa,**

Terima kasih banyak atas waktunya.

Bapak-Ibu sekalian,

Kalau kita bicara persoalan Kemendes secara normatif, maka kita bisa menemukan satu cara berpikir bahwa Kementerian Desa ini adalah sebuah Kementerian untuk menyelesaikan problematika yang ada di desa di seluruh Indonesia, karena namanya saja Kementerian Desa, baik secara regulatif mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan desa maupun yang bersifat kebijakan.

Dari sisi regulasi, Pak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian, saya mengharapkan Kementerian Desa ini mampu untuk melindungi, ya, melindungi Pemerintah desa dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap implementasi program. Ini yang tentunya butuh *support*, butuh regulasi dan butuh perlindungan, karena kita banyak menemukan keluhan-keluhan, Pak Menteri, bahwa mereka selalu dihadapkan dari berbagai lini diserang kanan kiri depan belakang, mungkin Bapak *taulah* maksud saya, saya tidak perlu menjelaskan.

Ini butuh di-*support* secara regulasi maupun di-*support* dalam perspektif yang lain, ini...ini penting sekali, kenapa? Karena memang melaksanakan sebuah kebijakan dengan keragu-raguan itu akan jatuh ke jurang. *Nah*, oleh karena itu, Pak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian, bagaimana agar perangkat desa, kepala desa ini tidak jatuh ke jurang, ini dari sisi itu, dari sisi perlindungan dan regulasi.

Yang kedua, Pak Menteri yang saya hormati, berkaitan dengan program-program Kementerian yang terkait dengan desa. Kita minta Kementerian ini betul-betul mampu memberikan sebuah solusi yang terbaik terhadap berbagai dinamika ekonomi yang ada di masyarakat, karena saya *tau*

betul Kementerian ini sangat dibutuhkan oleh desa. Oleh karena itu fungsi pasar desa, fungsi BUMDes, fungsi-fungsi lain ekonomi kreatif yang ada di desa, itu bisa dijalankan dengan baik oleh kementerian ini dengan pemerintahan di desa.

Saya punya contoh, Pak Menteri. Jadi ada sebuah desa yang punya ini, ya, air, tapi betapa sulitnya Pak Menteri, untuk dapat izin. Ini siapa yang akan bisa mem-*backup* mereka. Kemarin saya sempat minum yang sudah dikemas bagus begini tapi memang izinya belum punya, itu di Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek Pak Menteri, mohon dicatat biar Pak Menteri bisa memberikan solusi, ini kepentingannya adalah membangun ekonomi kreatif, membangun basis-basis ekonomi yang ada di desa itu.

Karenanya ke depan ini butuh, Bapak kan sudah kasih banyak program di BUMDes ini, di BUMDes itu banyak, syukur-syukur ke depan ditambah, tapi kalau tidak tambah maka BUMDes ini implementatif. Artinya BUMDes yang kita *support* kan kepada mereka itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat bisa merangsang ekonomi masyarakat, bisa memberikan apa...sentuhan-sentuhan kepada masyarakat untuk mengembangkan BUMDes ini, karena saya banyak menemukan mereka punya banyak air minum, punya kemasan-kemasan, apa, kreativitas tetapi ada persoalan-persoalan perizinan yang butuh di-*support* oleh kementerian ini.

Saya pikir itu, Pak Menteri, yang terakhir ke depan kita mengharapkan di desa itu ada hal yang butuh di-*support* oleh kementerian ini, misal jalan-jalan yang ada antar Dukuh, antar RT, antar RW itu, ini bisa diprogramkan. Kemarin kayaknya mau ada itu tapi *kok* menjadi *nggak* ada lagi itu. Jadi, jalan-jalan dari antar RT, antar RW ini, ini-ini-ini-ini ke depan butuh dibuat program Pak Menteri, biar yang masuk-masuk di lini-lini pelosok-pelosok yang di dalam-dalam itu...itu ya, mempunyai sentuhan untuk pelaksanaan aspal, jalan yang tidak becek, yang baik, yang bersih. Karena kalau jalan desa sudah dipikir oleh pemerintah desa, kalau sampai ke pelosok-pelosok itu duit desa *nggak* cukup Pak Menteri.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Akhirul kalam,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Ali.

Senior kita Pak Sudjadi, silakan, Pak Sudjadi.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan,
Pak Menteri, beserta
Seluruh jajarannya yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan,**

Saya bertanya yang ringan-ringan saja, seperti harapan partai politik bahwa besok Pemilu itu penuh kegembiraan. Jadi, dua pertanyaan saya itu *Insyallah* penuh kegembiraan.

Yang pertama, saya inikan Pak Menteri, dulu istilah *mbok menowo*, hari ini (*suara kurang jelas*) pasti ada wisata desa.

Yang kedua, saya berdoa saya dengan Pak Menteri, beberapa bulan ke depan doanya sama, *Robbi anzilni munzalan mubarokan wa anta khoiril munzalin*, Ya Allah berkatilah aku sebagaimana aku telah berkatilah di DPR lagi.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudjadi.

Pak Eddy Santana, silakan, Pak Eddy.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan rapat sekaligus Ketua, wakil ketua Komisi V yang saya hormati,
beserta
Seluruh anggota,
Menteri PDPT, beserta
Seluruh jajaran yang sama saya hormati,**

Pertama, masih ada juga pertanyaan saya *gitu*, ya, apakah yang saya yakini ini ada-ada suatu yang harus diperbaiki atau memang seperti inilah pengalokasian dana *gitu* ya, yang di sini kalau untuk sumber daya manusia honorarium atau gaji itu tapi di sini dimasukkan dalam belanja barang dan jasa. *Nah*, ini belanja barang jasa yang 2,6 di sini ya belanja modal 42, jadi 2,7 belanja barang dan jasa, belanja modal. *Nah*, untuk pertanyaan saya, bisakah ini dibuat detailnya seperti apa, tidak perlu dijawab sekarang tapi secara tertulis itu bagaimana, apakah ini harus berjalan seperti ini atau kita benerin *gitu* ya ke depan? Termasuk belanja pegawai atau apa di sini *gitu*. Apakah...menurut saya honorarium ataupun apa namanya gaji pendamping desa itu, ya, itu bukan...bukan belanja barang dan jasa, bukan program itu ya, memang seperti itu kita harus kita gaji.

Ya silakan kita gaji orang honorarium 35 ribu pendamping *gitu* untuk 72 ribu desa, satu pendamping dia bisa mengawasi, mendampingi dua desa, *gitu*, tapi saya rasa harus...harus, pengalokasiannya harus ditempatkan dengan sebenarnya *gitu* ya.

Kemudian, pertanyaan saya yang kedua, adakah dalam perjalanannya di 2023 atau pengalaman 2022 ada sisa anggaran *nggak*? Sisa tender atau apa yang bisa digunakan *gitu* ya, yang bisa digunakan. *Nah*, saya menyarankan penggunaan sisa-sisa tender atau sisa anggaran supaya tidak terjadi Silva itu diarahkan saja ke desa wisata, memang menarik Pak Menteri dan teman-teman ya, di desa wisata ini kita banyak sekali ini antusias sekali Masyarakat. Wisata kelas desa kan tidak begitu sulit kita membinanya juga untuk anggarannya terlalu besar tapi manfaatnya besar sekali *gitu* bagi desa sendiri, ada pemasukan kelas desalah mereka.

Nanti saya laporkan rinci di tempat saya yang sudah dapat itu Pak, ya anggaran desa wisata itu yang setiap hari Sabtu-Minggu malah ribuan orang datang di sekitar situ saja, desa, di Kecamatan situ saja udah, sudah ribuan, jadi pemasukannya banyak dia kerja sama swasta dengan desa dan desanya dapat pemasukan *gitu*. *Nah*, ini luar biasa saya kira, apabila kita mengarahkan seperti itu di tempat-tempat yang kita berikan pendanaan ya, ini akan sangat baik sekali.

Nah, kemudian untuk 2024, Pak, 2024, ya, ada sebenarnya total Pagu Indikatif kita itu 2,757 dari pembicaraan TM, ya, dari Pagu kebutuhan 4,7. Jadi ada *backlog* 2 T, 2 triliun ya. Memang kita dengan Kementerian Desa ini *gimana gitu* ya kita mendukung itu, sangat mendukung apabila Kementerian Desa ini jadi-jadi *trigger gitu* desa, untuk memajukan desa, jangan nanti cuman buat jembatan satu 7,8 ada pasar berapa unit, rumah 120 unit. Di PUPR itu rumah Pak, perbaikan-perbaikan rumah itu kita bisa mengajukan, ya 1.700, ada 100 ribu, Pak, lebih itu rumah itu, masih dekat kita ini 120 unit, apa *nggak gitu* serahkan aja ke PU-lah itu jembatan, jalan desa apa itu pasar, udah PU ajalah ini PUPR *gitu*. *Nah*, kita yang ini yang benar-benar kita bisa menaikkan, menghidupkan perekonomian desa *gitu*. *Okelah* pasar mungkin bisa *aja* tapi *nggak* usah kita bangun jalan desa *gitu*, *gimana* mengaksesnya, Pak, kami jadi iri, irinya begini, *oh* jalan *tuh* jatuhnya di mana di Indonesia ini satu-satu atau dua unit, dua jalan itu atau satu unit jembatan, kan kita juga mau, Pak, banyak desa-desa kami yang perlu jembatan seperti itu.

Nah, 120 unitnya di mana kami juga ingin, Pak, rumah-rumah desa itu ada perbaikan atau apa pembangunan. *Nah*, ini yang menurut saya kurang pas *gitu* kan, ada rasa ketidakadilan juga penempatannya karena keterbatasan anggaran kami mengerti itu. *Nah*, lebih baik Kementerian Desa apalah *gitu* ya dan kita memang tadi seperti pimpinan rapat, Ketua, kita perjuangkan, kita perjuangkannya *gimana* Pak, sebetulnya Bapak kan lebih dekat dengan presiden itu kan, pembantu langsung, apa *ndak* bisa *ngomong* "Pak ini kami *backlog* 4 T ini eh 2 T ini, jadikanlah Pak, 2,7 juta ini jadi 4,7 *gitu*."

Saya rasa kalau pembicaraannya pas *gitu* kan bisa dimengerti dan ini memang dibutuhkan pembangunan desa ini, saya kira akan ditambah jadi Kementerian Desa ini. *Nah*, ini-ini-ini, kalau anggarannya tetap begini saja, Pak, ya itu sangat terbatas sekali dan-dan akhirnya ya itu. Ya mohon maaf saya pertama *ngomong* waktu pertama ketemu, Pak, jadi kasir *aja* kita apa cuma menggaji orang *aja* anggaran kita sebanyak 60% Pak, dari anggaran itu untuk-untuk menggaji, untuk honorarium. *Nah*, ini-ini 58%, 60%, saya kira ini Pak, jadi kita evaluasi.

Nah, yang paling tepat, yang paling pas kalau di tempat saya Pak, anggaran desa wisata *gitu*. *Nah*, inilah yang diperbanyak, kalau perlu untuk tahun ini ditambah, Pak, ini masing-masing kita bisa mengalokasikan lima kalo *nggak* salah, tambah, kalo bisa ditambah lima daripada program yang lain-lain yang-yang-yang *nggak* jelas juga, Pak. Tadi, tidak menganut asas keadilan dari 120 unit, jembatan satu, jalan satu, pasar dua seperti itu. *Nah*, ini...ini tolong diperhatikan, tolong dievaluasi urusan seperti itu.

Terima kasih, ini saja, Pak Pimpinan, mohon maaf apabila ada kekurangan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Eddy. Pak Dedi Wahidi.

F – PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Pak Ketua beserta seluruh jajaran Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Saya singkat dan ringan-ringan saja Pak, seperti Pak senior kita tadi. Saya mendukung usulan teman-teman termasuk dari Pak Eddy, saya juga cemburu Pak Eddy, tadi sama-sama dengan Pak Tamanuri rapat di Banggar, dia izin katanya mau rapat dengan Pak Menteri Desa "Ada apa, Pak?", "Saya dapat anggaran 2 miliar", "*Loh* saya *kok* *nggak* dapat", jadi inikan cemburu ini karena anggarannya yang...yang sedikit, Pak.

Jadi, saya setuju sama Pak Eddy fokus di BUMDes ya, Pak, sama desa wisata tapi anggarannya perlu ditambah, ini yang tanggung jawab Pak Syarif, maka nanti Pak Syarif bicaranya terakhir karena beliau Wakil Ketua Banggar ya kan? Pak Jayadi, ya tanggung jawabnya, Pak Syarif maka tadinya Pak Syarif mau bicara sebelum saya, jangan kata saya, setelah saya karena nanti tanggung jawab akhir di dia, saya sebagai Anggota Banggar setuju saja Pak

Syarif, ini Pak Menteri anggarannya harus ditambah menjadi 4,7 supaya kita kebagian semua.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya ada Wakil Banggar rupayanya di sini Pak Eddy, ada Wakil Banggar, ada Anggota-Anggota Banggar luar biasa ini sebenarnya, harusnya menjadi perjuangan mereka untuk mengejar *backlog* yang Pak Menteri sampaikan tadi.

Terakhir Pak Syarif, silakan Pak Syarif. *Oh* masih ada Pak Tamanuri, *oh* beliau kesimpulan, *oh* iya silakan Pak Tamanuri. Memang Pak Tamanuri ini bisa pimpinan sidang, Pak.

F – P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pak Pimpinan,
Para Anggota,
Yang saya banggakan Pak Menteri, serta
Seluruh jajaran,
Hadirin yang berbahagia,**

Saya berterima kasih Pak, sudah mendapatkan satu rangsangan-rangsangan dalam tahun ini sehingga bisa menambah nama saya di lapangan, tapi ada di antara yang sampai sekarang ini petugas dari Kementerian belum sampai di bawah. Apa ada alokasi ke saya dana sekitar 2 miliar dan saya sudah buat untuk 6 jalan lingkungan desa, desa transmigrasi ini, jadi jangan itu Pak, itu Pak Eddy, jangan salah sangka ini desa transmigrasi, Bapak bukan transmigrasi Pak, jangan-jangan marah sama Pak Menteri.

Pak Menteri, saya ini, di wilayah saya tujuh Kabupaten ada 1.331 desa, jadi situ macam-macam model-modelnya, ada yang masuk Kejaksaan, ada yang sudah di DPO segala macam segala macam, ini wajar, karena ada yang baru melihat duit 700 juta, 1 miliar wajar-wajar sajalah seperti itu, karena memang jiwanya belum kita didik.

Oleh karena itu, harapan saya adalah ini dalam program Bapak ini di dalam ruang dana desa ini ditekankan betul bahwa setiap tahunnya ada pendidikan para kepala desa itu sehingga mereka bisa mengetahui dan bertanggung jawab terhadap dana desa yang diberikan mereka apa dia 700 apa 1 miliar apa lebih dari situ untuk membentuk watak mereka. Ini *nggak* bisa dikejar-kejar sama jaksa sama polisi, Pak, wataknya yang harus kita rubah, watak malingnya ini, ada barusan ini lari ke Kalimantan Timur, itu sudah wajar-wajar saya rasa.

Kemudian, saya curhat, Pak, mudah-mudahan ada nota Bapak mungkin berhasil. Ini ada salah satu desa di tempat saya, pemilihan kepala desa, dia menang, tapi ada kemelutnya di masalah ijazah jadi diberhentikan sama, *nggak* dilantik sama bupati, yang dilantik sama bupati yang nomor dua menang, hebat kan, ada PAW di situ yang nomor dua menang dilantik. Kemudian, setelah ditelusuri lagi ijazahnya bagus, ijazah yang tadi itu yang diberhentikan itu bagus paket C.

Jadi, untuk mengembalikan ini kok bupati *nggak* mau Pak, bupati *nggak* mau dan itu sudah jelas-jelas salah, ini bukan legislasi, bukan legislatif, bukan DPR, bisa yang bawahnya bisa gantikan yang di atas, ya buat pemilihan ulang. *Nah*, ini mungkin walaupun bukan ranah Bapak tapi Bapak kan sebagai Bapak-Bapak-Bapak-Bapak daripada para kepala desa mungkin Bapak, bisa *ngomong* dengan Pak Tito karena itu, tolong itu tolong.

Kemudian, di dana satu miliar ini kiranya bisa dievaluasilah di bawah itu. saya tidak mau menyebutkan di mana-mana desanya, banyak sekali desa-desa kita yang belum memiliki Balai Desa. Coba dikasih kebijaksanaan, diskresilah sini karena udah jelas bahwa dana ini hanya bisa diperuntukkan waktu pertama kali tahun 2015 keluarnya dana desa, bisa untuk diperuntukkan untuk membangun balai desa, sekarang ini tidak bisa lagi kecuali ada rekomendasi Bupati.

Nah, ini tolong Pak, sebab masih banyak, saya kadang-kadang masuk di situ, begitu masuk putih ini rambut saya karena yang dari atas itu pada turun semua. *Nah*, ini kita bantulah kita kasih kebijaksanaan supaya mereka bisa membangun balai desanya.

Kemudian selain daripada itu, saya menyokong ini pendapat kawan-kawan tadi, seperti pasar-pasar desa yang sekarang ini sudah ada embrio-embrionya untuk mereka jual beli di situ, walaupun belum ada pasarnya kita bantu, kita kasih rangsangan. *Nah*, ini mungkin di dalam kebijaksanaan setiap tahun itu yang di, yang di...di...di, yang masuk juga seperti program aspirasi itu kita kasih rangsangan apa dia 500 juta apa dia 300 juta sehingga bisa mereka membangun pasar desanya. Saya rasa ini ini membuahkan satu hasil yang baik walaupun saya-saya yakin Pak, Bapak itu yang Bapak perhatikan 79.400 Pak, desa, saya aja yang memikirkan 1.331 pening apalagi Bapak, ada pokok dua, 2,7 triliun mau memperhatikan 74.900 desa, ya, jelas pening, pusing, Pak, ya cuman namanya ya kehidupan kita ini apa namanya kita berjuang terus.

Saya rasa demikian, terima kasih, Pak, enteng aja kan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Enteng Pak Tamanuri, *enteng*. Pak Syarif silakan, Pak Syarif.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera,

**Pimpinan rapat,
Bapak Menteri beserta jajaran,
Rekan-rekan Anggota Komisi V,**

Yang pertama berkaitan dengan anggaran 2023 saya lihat ada beberapa yang sudah dilaksanakan cuma perlu juga diketahui, Pak, terutama di tempat saya masih ada beberapa yang belum termasuk dengan sapras, ya. Jadi, ya kalau yang ini tolong dipercepatlah karena ini sudah bulan...bulan Juni dan itu berkali-kali saja...apa berkali-kali ke Pak Kades saya tanya saya kapan ini, saya kira itu yang jadi apa, perlu untuk dilaksanakan.

Yang kedua, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya memang, saya kira ini perlu secara keseluruhanlah bukan hanya ya, kebetulan mitra kita ini komisi apa Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, tapi juga yang lain-lain juga saya lihat kebetulan saya juga di Pimpinan Banggar memang perlu ada satu persepsi yang harus dibangun di pemerintah.

Artinya *gini*, ini supaya fokus kita ini kalau Menteri Desa ini titik tumpunya di mana, *gitu*. Artinya, yang menjadi unggulan berkaitan dengan desa ini, ya, kalau umpamanya unggulan desa ini sekarang mungkin infrastruktur sudah ditangani oleh Kementerian PU ada beberapa *gitu* ya, kemudian dana desa dan sebagainya ya, seharusnya *nggak* perlu lagi dengan anggaran-anggaran seperti ini.

Sekarang umpamanya yang perlu sangat tadi dan itu saya lihat beberapa saya dapati program...ya, saya terima kasih dengan Kementerian Desa dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi di desa. BUMDes itu sangat baik Pak. Kemudian, apa desa wisata desa itu kan tidak bisa di *couple* oleh Kementerian Pariwisata, BUMDes tidak bisa di-*couple* oleh Menteri BUMN sehingga dengan demikian itu dalam rangka untuk mempercepat terhadap kesejahteraan kita, sehingga ini kan bisa tertumpuk.

Kalau cuma umpama seperti ini, mohon maaf saya lihat umpamanya jembatan 7,8 M, kemudian sarana air bersih, drainase, dan sebagainya, ini sebenarnya *udah* dibantu juga dengan padat karya yang ada di PU termasuk air bersih itu cukup banyak juga yang dilaksanakan oleh Kementerian PU yang bersifat padat karya, yang sifat pendekatan...apa program kerakyatan termasuk rumah tadi yang disampaikan oleh teman-teman.

Kenapa dana-dana yang seperti ini kita tumpukan kepada itu, soalnya terus terang saya, saya lihat macam Mensos *eh*, Kementerian Sosial

umpamanya saya mohon maaf juga, bantu juga sapi padahal udah juga di pertanian *gitu* sehingga program-program kita itu masing-masing Kementerian itu kepada sektornya, sehingga tidak...tidak terlalu, ya, maaf saja umpamanya kalau macam Menteri Desa, bangun rumah cuma berapa unit, itu sebelah unit dan itu tidak juga semua daerah kan juga tidak juga manfaatnya terlalu.

Saya kira, hal-hal ini saya ada beberapa desa yang diberikan bantuan walaupun tidak maksimal oleh Kementerian Desa, tapi setelah saya lihat cukup baik. Ada beberapa kabupaten saya *tengok eh* saya lihat di sana kemudian setelah ada bantuan itu cukup...cukup produktif, termasuk BUMDes, Pak. Dan, ini ada kita dapat juga ada beberapa. Kalau ini sebenarnya bisa ditingkatkan dan ini cukup sangat berarti itu, sehingga progres masing-masing kementerian itu kan akan kelihatan, pada akhirnya nanti.

Saya kira inilah beberapa hal secara umum berkaitan dengan ini untuk di...saya melihat di anggaran di tahun 2024 ini. Sehingga, apa yang menjadi harapan dari kami tentu banyak hal-hal yang sangat bermanfaat di desa itu yang perlu sebenarnya belum tertangani, baik oleh kementerian yang lain itu. Jadi, Kementerian Desa ini kita harapkan sebagai titik sumbunya berkaitan dengan Menteri Desa sebagai...sebagai *leading* sektornya terhadap beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu.

Saya kira ini saja dari saya, terima kasih saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Interupsi, interupsi. Tadi bagaimana banggarnya *kok ndak* ada kata-katanya.

KETUA RAPAT:

Simpan dalam hati kalau tidak salah, simpan dalam hati.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Ya pokoknya nanti kita kan harus kementerian dulu kita lihat berapa yang diajukan. Ya silakan, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syarif. Terakhir Pak Syarif ya, masih ada yang lain? Cukup, ya. Baik silakan, Pak Menteri, dijawab lebih tepat ya, cepat, tepat dan dapat dimengerti. Silakan dijawab.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,,

Yang pertama, terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Yang kedua, beberapa hal yang ingin kami respon singkat sambil nanti akan kita kirim respon secara tertulis. Pertama, terkait dengan Pilkades ini menjadi keprihatinan kita semua jadi saya juga sering mendapatkan keluhan meskipun itu di luar kewenangan Kementerian Desa, tapi saya sering juga berkomunikasi dengan Pak Mendagri menyampaikan itu termasuk yang pembatasan itu sudah dua kali saya diskusi dengan beliau untuk segera dilakukan penataan-penataan dan saya selaku Menteri Desa siap untuk menjadi bagian dari penataan itu. Mudah-mudahan segera ada langkah-langkah konkrit.

Kemudian yang kedua, termasuk ini, termasuk posisi perangkat desa itu yang juga muncul terus dari keluhan yang menurut perangkat desa itu *ndak* punya status yang jelas ini juga sudah kita sampaikan kepada Pak Mendagri.

Kemudian, yang kedua untuk RKA 2024, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa apa yang menjadi rekomendasi Komisi V di antaranya juga tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan rapat, dua hal yang mungkin ada prioritas tadi dari seluruh...apa komentar, tanggapan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V, yaitu untuk kepentingan peningkatan produktivitas dan peningkatan SDM. *Nah*, saya pikir ini satu hal yang perlu kita pertajam nanti di 2024 dan waktunya memang masih cukup, termasuk di dalamnya saya sepakat ada dana desa yang diperbolehkan untuk pemanfaatan pembangunan kantor desa dengan syarat-syarat tertentu.

Sebenarnya, ini 2023 prioritas penggunaan dana desa untuk 2023 sudah masuk dalam draf yang kita siapkan. *Nah*, waktu itu sudah hampir selesai, *clear* lintas Kementerian *tau-tau* ada surat dari istana agar penguatan pada ketahanan *pangan*, akhirnya kita-kita *cancel* lagilah.

Mudah-mudahan dengan covid yang sudah dicabut oleh WHO, kemudian ketahanan pangan terus juga kita gulirkan kita kembangkan. *Nah*, saya sepakat nanti untuk kita diskusikan lagi dan kita masukkan agar dana desa bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa dengan syarat dan ketentuan. Misalnya, belum punya kantor desa, betul-betul belum punya dan seterusnya ini nanti-nanti mohon dukungan juga dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Kemudian, juga terkait dengan diksi Daerah Tertinggal, ini memang terus jadi diskusi kita. *Nah*, hari ini pembicaraan kita terkait dengan RPJP 2024-2045, itu memang sudah kita mulai rubah diksi-diksi daerah tertinggal, karena

sudah semakin banyak yang terentaskan, ketika tinggal pengawalan jadi setelah terentaskan kan masih ada sekian waktu kita mendampingi sampai betul-betul selesai. *Nah*, ketika sudah tinggal pengawalan kita harapkan tidak ada lagi diksi daerah tertinggal, yang justru kita nanti akan kuatkan adalah daerah perbatasan terdepan, terluar, dan terdepan.

Kemudian, terkait dengan temuan BPK dan permasalahan untuk penanganan rekomendasi, saya sepakat untuk kita tela'ah agar dana dekon ditarik ke pusat. Ini kemarin juga kita ambil ketika IFAD yang banyak dekon kita tarik ke pusat, *alhamdulillah*, kemudian temuannya cuma 1,9 M dari sekian ratus miliar dan apa namanya sudah selesai semua hampir selesai tinggal beberapa ratus juta aja.

Nah, di sini memang terbukti bahwa, desentralisasi itu kadang-kadang juga penting dalam hal-hal tertentu meskipun pada saatnya nanti juga akan setelah siap harus didekonsentrasikan lagi untuk dibawa ke daerah.

Kemudian, terkait dengan pengayoman kepada pemerintah desa, *Insyah* Allah kita terus melakukan itu dengan tiga pilar yaitu Kementerian Desa, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, ini sudah beberapa daerah menjadi *piloting* kita misalnya di Grobogan, itu bagus *banget* pendampingan dari aparat penegak hukum, tidak ada yang kemudian sudah menjadikan pemerintah desa galau dan sebanyak aduan yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik di sana, ini nanti akan menjadi upaya kita untuk diperluas dan itu memang menjadi tugas utama kita agar pemanfaatan dana desa dan pola transparansi di dalam perencanaan pelaksanaan dan moneter pembangunan yang tertinggi di semua level itu ada di desa, karena masyarakat bisa *tau* dananya berapa, digunakan untuk apa, di mana lokasinya itu mulai dari Musdes yang kita perluas bukan hanya peserta Musdes yang boleh ikut, warga masyarakat umum pun boleh ikut tapi tidak boleh berbicara dan tidak boleh bersuara. Jadi, menyaksikan, ini dalam rangka membangun psikologi transparansi, tapi ketika selesai musyawarah desa dia berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa atau perangkat desa.

Kemudian, yang terkait dengan program-program yang belum realisasi *Insyah* Allah di bulan Juni akan ada realisasi lagi tahap pertama, dengan beberapa program yang sudah menjadi prioritas Bapak-Ibu sekalian, termasuk Sarpras.

Yang terakhir, terkait dengan pendamping desa yang *nyaleg* pasti kita akan cek dan kita akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu, Pak Ketua, dari seluruh rangkuman yang bisa kami respon langsung pada hari ini. *Nah*, beberapa data tentu akan kita sampaikan secara tertulis.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Sekarang masuk pada kesimpulan ya, masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Cukup ya, baik.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa, 30 Mei 2023.

Karena *agak* panjang ini mungkin satu per satu saya tanyakan kepada Anggota Komisi V yang terhormat ya.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR.

Ada tanggapan di sini, Pak? Setuju? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN, serapan APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian bulan Mei 2023 sebagai berikut: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi realisasi keuangannya 28,08% dan fisik realisasi fisik adalah sebesar 30,20%.

Bagaimana nomor 2? Setuju, Pak, ya, baik.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi V DPR RI, memahami paparan tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI, Nomor S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023, ini Pagu Indikatif, Pagu Indikatif belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:
 - a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kebutuhan, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.744.518.054.000,- sementara indikatifnya

adalah Rp2.757.268.038.000 *backlog*-nya adalah 1,9 triliun lebih; selanjutnya

- b. Komisi V DPR RI, bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan rencana Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.

Nomor tiga, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi V DPR RI, sepakat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD...DPRD.

Setuju, Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Komisi V setuju, bagaimana dengan kementerian silakan, Pak.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kalau memang demikian saya ketok untuk persetujuan apa namanya dari draf kesimpulan tadi menjadi kesimpulan.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara Raker hari ini telah kita selesaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, saya berikan kesempatan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan kata penutup.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih, Pimpinan rapat.

Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Kami atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan terima kasih atas dukungan arahan dan monitoring yang selama ini dilakukan oleh para Pimpinan dan Anggota Komisi V sehingga kinerja-kinerja kami terus terkontrol dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk semakin meningkatkan prestasi kinerja.

Yang kedua, satu yang belum saya respon tadi dari Anggota Komisi V yaitu Pak Sudjadi, saya sepakat dan saya mendoakan mudah-mudahan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V yang ikut kontestasi 2024 kembali ke Senayan dengan penuh keberkahan dan saya salah satu bagian ikut barokahnya Komisi V.

Saya kira *gitu*, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam

Demikianlah, Saudara-Saudara rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan, semoga hal yang kita diskusikan yang kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, Amin.

Saya kira, kita tutup acara pada hari ini...sore hari ini dengan ucapan, "*bismillahirrahmanirrahim*".

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)

JAKARTA, 30 Mei 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002